

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional (GBHN 1998:44). Pembangunan pada sektor pendidikan, merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh dan dalam upaya mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang utuh. Hal ini tercermin pada amanat GBHN yang dengan tegas menyatakan bahwa, pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil (GBHN, 1998:73).

Fenomena tersebut di atas pada dasarnya menghendaki adanya suatu sistem pendidikan yang komprehensif yaitu, bentuk dan jenis pendidikan yang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang menginginkan adanya pembinaan anak dan diselenggarakan secara berimbang antara nilai (*value*) dan sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*), kemampuan berkomunikasi (*communicated*) dan kesadaran terhadap lingkungannya. Pendidikan terpadu inilah yang dinilai sangat urgen dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Sebab pada pelaksanaannya nanti, pendidikan tidak hanya diminta tanggung jawabnya dalam membina, melatih dan mendayagunakan seluruh potensi atau kemampuan

manusia (daya talar, daya fisik, daya cipta, daya karsa maupun budi pekerti) melainkan lebih jauh dari itu yaitu menyiapkan manusia Indonesia yang mampu secara fungsional dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam memenuhi keinginan masyarakat tersebut, pemerintah pada tahun 1989 telah menetapkan sebuah undang undang yang secara khusus mengatur masalah kependidikan nasional. Melalui Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) itu disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah (PLS). Adapun yang dimaksud jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. (UU RI. No. 2 tahun 1989:4)

Dalam pelaksanaannya, jalur pendidikan sekolah diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang berada di bawah koordinasi Depdiknas dan Depag RI atau di Departemen-deartemen lain yang menyelenggarakan pendidikan sekolah. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah diselenggarakan dalam bentuk, *madrasah masjid*, *madrasah diniyah* (sekolah agama) *majlis ta'lim*, Pondok Pesantren dan beberapa lembaga pendidikan terapan lainnya. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan

sekolah ataupun yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional.

Pondok pesantren, sebagai sub-sistem pendidikan nasional, sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Hal ini karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Secara historis, pada awalnya pondok pesantren berdiri dengan fasilitas yang sangat sederhana, metode pengajaran yang digunakan kiyai dalam menyampaikan kitab kuning (KK) juga sangat unik yaitu metode *bandongan* dan *sorogan*. Namun perkembangan selanjutnya, pondok pesantren banyak memperoleh tantangan dari sistem pendidikan *ala* Belanda sebagai penjajah saat itu. Di sisi lain, pendidikan pondok pesantren tradisional harus berhadapan dengan sistem pendidikan Belanda, sehingga menurut Yusuf Hasyim (1988:90) “sistem pendidikan pondok pesantren ditransformasikan agar mampu mengantarkan kaum muslimin ke gerbang rasionalitas dan kemajuan. Jika pondok pesantren tetap dipertahankan, maka berarti mempertahankan keterbelakangan dan kejumudan kaum muslimin”.

Gerakan reformis muslimin sejak awal abad ke-20 selalu mencari momentum dalam upaya menjawab tantangan jaman yaitu melalui reformasi sistem pendidikan Islam. Karena itu, Nurkholis Madjid (1997: xiv) mengemukakan bahwa, “dalam konteks ini kita menyaksikan munculnya dua bentuk kelembagaan modern Islam yaitu *pertama* sekolah-sekolah umum model Belanda tetap diberi muatan peng-

ajaran Islam, *kedua* madrasah-madrasah modern yang cukup, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda”.

Sesuai dengan *ideologi developmentalism*, pembaharuan pondok pesantren seyogyanya di arahkan kepada upaya pengembangan dunia dan substansi pendidikan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan jaman. Selain itu, pembaharuan pondok pesantren diharapkan tidak hanya berkisar pada pengadopsian substansi sistem pendidikan secara keseluruhan maupun terbatas pada model pendidikan Belanda. Tetapi lebih dari itu, pembaharuan Pondok Pesantren lebih diarahkan untuk fungsionalisasi atau refungsionalisasi yaitu Pondok Pesantren sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan posisi dan kedudukan yang khas, pondok pesantren diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value oriented development*).

Dengan posisi dan kedudukan seperti di atas, pondok pesantren diharapkan menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Yang lebih penting dari semua itu adalah, pondok pesantren dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak heran jika akhir-akhir ini banyak pondok pesantren bermunculan yang berorientasi dan beraktivitas pada bidang *vokasional* dan ekonomi seperti usaha dalam bidang agrobisnis, meliputi: pertanian tanaman

pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan; atupun usaha dalam bidang pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan dan koperasi.

Gambaran di atas, telah dan sedang dilakukan Pondok Pesantren al-Ittihad yang berlokasi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Baturajeg Kabupaten Majalengka. Pondok Pesantren al-Ittihad, sejak berdiri hingga kini menempatkan dirinya sebagai sosok pondok pesantren yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan sekolah tetapi juga sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang *vokasional* yakni membekali para santrinya dengan berbagai keterampilan seperti beternak, agrobisnis tanaman pangan dan industri rumah tangga dan industri kecil.

Hasil observasi pendahuluan diperoleh data bahwa, kegiatan-kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren al-Ittihad dilaksanakan melalui dua jalur pendidikan yaitu pertama melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur PLS. Lembaga pendidikan sekolah bersifat keagamaan yang ada di Pondok Pesantren al-Ittihad meliputi Madrasah Diniyah (MI), MTs dan MA dengan para tenaga pendidik yang hampir semuanya adalah para guru honorer. Sedangkan lembaga PLS yang ada di Pondok Pesantren al-Ittihad yaitu *majlis ta'lim* bagi masyarakat umum, pengajian al-quran dan KK melalui *madrasah masjid* yang bertempat di masjid dengan dibina oleh para ustadz dan kiyai Pondok Pesantren al-Ittihad.

Aktivitas yang berkaitan dengan *vokasional*, di Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy pada mulanya mengirim beberapa orang santri ke H. Bahrin (Bogor) untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam bidang pertanian dan perikanan.

Pada saat yang sama, juga dikirim beberapa orang santri ke SKB Lembang, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang manajemen kewirausahaan. Di samping itu, Pondok Pesantren al-Ittihad menjalin kemitraan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Kabupaten Majalengka dalam rangka mendidik dan melatih para santri tentang kewirausahaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan. Kewirausahaan yang diberikan Deperindag, sesuai keputusan bersama antara Deperindag dengan Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy adalah pemanfaatan kekayaan alam seperti kayu, bambu dan lain sebagainya. Sedangkan peserta didiknya adalah para santri dan masyarakat desa setempat yang berminat.

Pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy, merupakan pengembangan dari konsep *Adult Education* (pendidikan orang dewasa). Sanafiah Faisal (1978:44) mengemukakan, “istilah *adult education* menunjuk pada aktifitas-aktifitas pendidikan bagi orang dewasa yang berlangsung di luar sistem persekolahan. Sedangkan pengertian orang dewasa, termasuk di dalamnya adalah mereka yang berusia muda dan remaja, baik pria maupun wanita. Jenis program pendidikannya jelas yaitu sebagai pendidikan bekal kerja di masa depan”.

Dengan demikian, kegiatan yang diikuti para santri Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy adalah *pertama*, pengajian al-quran dan KK yang diselenggarakan secara tradisional; *kedua*, belajar pengetahuan umum di lembaga pendidikan sekolah; *ketiga*, kegiatan kewirausahaan hasil kemitraan dengan

Deperindag. Dari beberapa kegiatan tersebut, yang menarik perhatian penulis adalah, kemitraan antara Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dengan Deperindag dalam bidang usaha permeubelan.

B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan dijadikan penelitian dalam studi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana latar belakang pondok pesantren al-Ittihad memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha meubel; dan faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang untuk menjadi usahawan meubel.

Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pertanyaan (fokus) penelitian dengan pokok-pokok pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang keikutsertaan santri menjadi peserta didik pendidikan kewirausahaan dalam bidang permeubelan yang diselenggarakan Pondok Pesantren al-Ittihad hasil kerja sama dengan Deperindag?
2. Bagaimana sistem dan program pendidikan kewirausahaan yang diikuti oleh santri sebagai peserta didik?
3. Bagaimana pengelolaan santri peserta pendidikan kewirausahaan?
4. Bagaimana hasil dan dampak pendidikan kewirausahaan bagi santri peserta didik melalui kemitraan?
5. Bagaimana faktor pendorong dan poenghambat bagi santrri peserta selama dan sesudah mengikuti pendidikan kewirausahaan?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini merupakan studi tentang pendidikan kewirausahaan, melalui kemitraan. Permasalahan yang akan diteliti adalah latar belakang keikut-sertaan santri yang menjadi peserta didik pendidikan kewirausahaan, sistem dan program pendidikannya, pengelolaan santri, hasil yang diperoleh dan dampaknya bagi santri atas keikut-sertaan dalam pendidikan kewirausahaan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat selama dan sesudah mengikuti pendidikan kewirausahaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini, secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang keikutsertaan santri dalam pendidikan kewirausahaan bidang permeubelan,

2. Untuk mengetahui tentang sistem dan program pelaksanaan pendidikan kewirausahaan,
3. Untuk mengetahui tentang sistem pengelolaan santri yang menjadi peserta didik pada pendidikan kewirausahaan,
4. Untuk mengetahui tentang hasil dan dampak bagi santri atas keikut-sertaannya pada pendidikan kewirausahaan.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat santri selama dan sesudah mengikuti pendidikan kewirausahaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis, kegiatan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan secara kemitraan menguatkan konsep kemitraan dalam pelaksanaan pendidikan. Sebab dengan kemitraan itu akan diperoleh efisiensi dan meminimalisasi biaya serta mencegah timbulnya *over investment* dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy ini akan memberikan sumbangan bagi masyarakat untuk menilai

dan menentukan model pesantren yang diminatinya. Sehingga keputusan untuk memilih pesantren yang mengupayakan santrinya menguasai keagamaan dan keterampilan secara seimbang, Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dapat dijadikan pertimbangan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah penelitian dan menghindari kemungkinan adanya salah tafsir, maka perlu adanya definisi operasional terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini. Istilah-istilah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Latar belakang adalah pemikiran-pemikiran yang memunculkan hasrat para santri untuk mengikuti pendidikan kewirausahaan dalam bidang permeubelan yang diselenggarakan secara kemitraan.

2. Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan, terdiri dari dua buah kata yaitu pendidikan dan kewirausahaan. Pendidikan, menurut UUSPN adalah, “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”; Sedangkan kewirausahaan atau wiraswasta menurut kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) yaitu “orang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru,

menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya”

Dari pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dalam hal tertentu yang berhubungan dengan pengenalan, pengamatan dan menentukan cara menyusun operasi pengadaan serta memasarkan produk baru. Di samping, bagaimana mengatur permodalan operasionalnya.

Melalui pendidikan kewirausahaan, diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memproduksi meubel baik secara pribadi ataupun berkelompok sekaligus mampu mencari peluang dan jeli dalam menangkap pangsa pasar bagi barang produksinya yang berupa meubel dengan model yang disenangi di masyarakat juga mampu mencari permodalan serta memanfaatkannya.

3. Kemitraan

Kata kemitraan, berasal dari kata mitra yang berarti “rekan”; kemitraan adalah hubungan kerja sama untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Pendidikan kewirausahaan melalui kemitraan dimaksud adalah, penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh suatu instansi atau lembaga secara bersama-sama didasari atas berkepentingan untuk mengantarkan peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka mampu memproduksi meubel dan memasarkannya dengan model-model

yang sedang populer di masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan kelak akan mengantarkan dirinya menjadi pengusaha atau sebagai pekerja pada suatu perusahaan meubel demi kehidupan dan penghidupannya di masa depan.

4. Sistem

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dalam berproses antara yang satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan. Pendidikan kewirausahaan sebagai suatu aktivitas pendidikan luar sekolah juga mengandung komponen-komponen sebagaimana komponen-komponen yang ada pada lembaga pendidikan sekolah. Menurut D. Sudjana (1996:31), “pendidikan luar sekolah pun mempunyai komponen-komponen yang dimiliki oleh pendidikan sekolah. Perbedaan komponennya.....adanya dua komponen tambahan yaitu masukan lain (*other input*) dan komponen pengaruh (*inpact*).

5. Pengertian Program

Program adalah rencana aktifitas yang dijadikan sebagai penentuan langkah-langkah atau tindakan yang akan dijalankan. Program pada pendidikan kewirausahaan adalah perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan kewirausahaan permeubelan.

6. Pengertian Hasil

Hasil adalah sesuatu yang dicapai dari aktifitas atau kegiatan. Yang dimaksud hasil pada pendidikan kewirausahaan adalah suatu perubahan yang diakibatkan kegiatan pendidikan kewirausahaan yang berupa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman tentang sesuatu yang berhubungan dengan kewirausahaan yang diselenggarakan melalui kemitraan antara Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dengan Deperindag Majalengka.

7. Dampak

Dampak adalah akibat dari suatu aktifitas. Dampak dalam hal ini adalah sesuatu yang diakibatkan dari pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan melalui kemitraan antara pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dengan Deperindag Majalengka terhadap peserta didik, terhadap kelembagaan pesantren dan terhadap lingkungan pesantren.

8. Pengelolaan

Pengelolaan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) berasal dari kata dasar “kelola”. Mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan “pengelolaan” berarti proses cara, perbuatan mengelola atau dapat juga berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah, pengelolaan santri sebagai peserta didik dalam pendidikan kewirausahaan terutama permeubelan.

9. Pendorong

Pendorong berasal dari kata “dorong” yang berarti mendesak dari bagian belakang, dilakukan dengan sekuat tenaga sehingga yang didorong bergerak ke depan; pendorong adalah orang yang mendorong yaitu melakukan desakan terhadap barang atau orang lain, sehingga yang didorongnya itu berubah tempatnya dari tempat semula. Mendorong dalam hal ini berarti memotivasi (*motivating*) atau memberikan dorongan bersifat moral kepada orang lain, sehingga terjadi perubahan perilakunya dari keadaan tertentu menjadi lebih baik. Pendorong (*motivator*), dalam hal ini adalah para pembina pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dan para pembina dari Deperindag Majalengka.

Faktor pendorong dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dilakukan, karena adanya keinginan peserta didik (santri) dan pengurus pesantren al-Ittihad Cipeundeuy. Di samping itu, adanya keinginan dari pemerintah (*political will*) melalui Departemen Agama RI dalam rangka meningkatkan mutu keluaran dari Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy

10. Penghambat

Penghambat berasal dari kata “hambat” yang berarti membuat sesuatu (pekerjaan atau perjalanan) menjadi tidak lancar; hambat berarti juga menekan.

Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, juga tidak lepas dari beberapa hambatan. Salah satu hambatannya adalah faktor transportasi. Jalan yang menghubungkan antara Desa Cipeundeuy dengan kota Kecamatan Bantarujeg adalah 18 km, dan jalan ke Kota Kabupaten 47 km. Sementara jalan desa yang telah ada keadaannya kurang baik dibandingkan dengan jalan di kecamatan.

